

# Denyut Nadi “KPPD” di Jawa Timur 1948-1949

Ari Sapto

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

email: arisaptomhum@yahoo.com

**Abstrak:** KPPD (Komisariat Pemerintah Pusat di Djawa) merupakan bagian dari PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia), kehadirannya mengisi kekosongan pemerintahan akibat pimpinan nasional berhasil ditawan Belanda dalam Agresi Militer II. Sebelum ditawan wakil presiden sempat memerintahkan untuk membentuk pemerintah darurat. Di tengah konflik senjata yang berlangsung keberadaan KPPD jelas mempunyai arti penting, baik secara internal maupun eksternal dalam hidup bernegara. Upaya menghidupkan KPPD dalam situasi konflik senjata di salah satu wilayah menjadi bukti bahwa RI tidak hancur dengan serangan militer.

**Kata-kata kunci:** pemerintah darurat, eksistensi, Jawa Timur

**Abstract:** KPPD (Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa), *Commisariat of Central Government in Djawa is part of PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) emergency government of Indonesia Republic, the existence it to fill in the empty of government because of national leader was succeeded to be arrested by Nederland in second military aggression. Before being arrested vice president gave command to make emergency government. In middle of conflict which was on going, the existence of KPPD had importance meaning in external or internal in life of state. The trying to live KPPD in conflict situation of gun in one of area to be the prove that RI was not collapse because of military aggression.*

**Key words:** Emergency government, existence, East Java

Pasca persetujuan Renville proses perundingan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda tampak tanda-tanda akan menemui jalan buntu. Kalangan militer Republik menganggap perundingan dengan Belanda sebagai taktik mengulur waktu. Memberikan waktu yang cukup bagi Belanda untuk memperbesar kekuatan militer. Kebuntuan perundingan diamati betul oleh para pemimpin Republik, baik sipil maupun militer, sehingga timbul keyakinan bahwa serangan Belanda hanyalah soal waktu saja. Argumen ini diperkuat adanya kenyataan bahwa ketua delegasi Belanda, Stikker, tidak kembali ke Yogyakarta dan tuntutan Belanda yang praktis tidak mengalami perubahan. Semakin diperkuat juga dengan adanya pelanggaran-pelanggaran gencatan senjata (Surat Tentara, Yogya Dokumenten, ANRI, no. inv. 318).

Hari Sabtu, malam minggu, tanggal 18 Desember 1948 jam 23.40, anggota delegasi Belanda J. Riphagen memberitahukan melalui surat kepada Soedjono, Sekretaris Jenderal Delegasi Republik di Jakarta, bahwa nanti jam 24.00 malam gencatan senjata dipandang tidak berlaku lagi. Oleh karena tidak ada kemungkinan mengirim kawat ke Yogyakarta malam itu juga, maka pemerintah Republik di Yogyakarta tidak dapat menerima kabar tentang pembatalan gencatan senjata itu dengan resmi. Surat pernyataan Dr. Beel atas nama pemerintah Belanda tidak segera disampaikan ke Yogya karena semua hubungan telepon/telegram telah diputus. Demikian pula pesawat Amerika dilarang terbang. Sejatinnya pesawat

itu akan dipakai oleh wakil KTN Cochran untuk terbang ke Yogya memberitahu pemerintah Republik mengenai keputusan sepihak Belanda itu. Pada pukul 01.00 Soedjono ditangkap (Agung, 1991: 206-207). Praktis Soedjono hanya sempat memegang surat pembatalan gencatan senjata selama 1 jam 20 menit. Hingga perang berakhir pemberitahuan pembatalan gencatan senjata secara resmi tidak pernah diterima oleh Pemerintah RI di Yogyakarta.

Pada tanggal 19 Desember 1948, pagi-pagi tentara Belanda dengan menggunakan lintas udara menyerang lapangan terbang Maguwo. Pukul 05.45 datang lima pesawat Jagers, tidak lama kemudian disusul enam pesawat sejenis sambil menembaki sasaran di bawah. Gemuruh suara pesawat, rentetan tembakan, dikira penduduk sebagai bagian dari latihan perang-perangan tentara Republik yang sebelumnya memang telah diumumkan. Tujuan Belanda dalam Agresi Militer II adalah menghancurkan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan Sukarno-Hatta 17 Agustus 1945. Rencana itu akan segera terwujud dengan cara menduduki ibukota dan menangkap para pemimpinnya. Menurut penguasa Belanda lahirnya Republik bukan dari kebangkitan kembali nasionalisme rakyat. Republik adalah produk daripada kolaborator Indonesia. Republik akan hancur apabila para pemimpinnya ditangkap. Pada “rencana pendudukan menyeluruh” yang digagas militer Belanda, perlawanan tergantung kepada kelompok pemimpin yang mem-

pengaruhi massa. Oleh karena itu aksi akan berjalan dengan cepat apabila pemimpin-pemimpin itu dilumpuhkan (Groen, 1991: 29). Setelah itu Belanda akan mendirikan negara sesuai dengan keinginannya, yaitu negara federal yang mempunyai hubungan dengan Belanda. RI perintang keinginan ini, karenanya harus dihancurkan. Pihak Belanda yakin dengan menguasai ibukota, menawan pemimpin-pemimpinnya, dan menguasai kota-kota penting, RI telah habis. Anggapan ini keliru, sebab RI adalah cita-cita yang telah hidup lebih dari 30 tahun yang lalu. Dipupuk oleh semangat dan disiram oleh berbagai problem, sehingga cita-cita tidak akan hilang demikian saja oleh gempuran militer Belanda. Satu hal yang dilupakan, demi cita-cita itu para pejuang rela menyerahkan dan mengerahkan apa saja, termasuk yang paling berharga: nyawanya.

Tulisan ini mencoba mencari jawab terhadap permasalahan bagaimana tanggapan daerah terhadap situasi nasional. Lebih khusus lagi mencoba mengetahui keberadaan KPPD (Komisariat Pemerintah Pusat di Djawa) sebagai upaya mengisi kekosongan pemerintahan akibat ditawan pimpinan nasional. Jawa Timur dipilih dengan pertimbangan bahwa aktifitas sebagian anggota KPPD berada di Jawa Timur.

### **PDRI: Rencana Menjadi Kenyataan**

Pada tanggal 18 Nopember 1948 Moh. Hatta, Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara, dan beberapa pejabat tinggi berangkat ke Bukittinggi dalam rangka penyelesaian masalah militer dan kemungkinan pendirian pemerintahan darurat di Sumatera (Imran, Djambari, Chaniago, 2003: 54; Zed, dkk., 1997: 580). Bagi Moh. Hatta kunjungan ini untuk yang keduanya. Perjalanan Moh. Hatta pertama ke Sumatera berlangsung tanggal 3 Juni 1947. Kunjungan pertama berkaitan dengan meletusnya dua revolusi sosial, masing-masing di Aceh dan Sumatera Timur. Alasan lain kunjungannya berkaitan dengan pemberontakan yang muncul di kampung Moh. Hatta sendiri pada 3 Maret 1947. Pemberontakan ditujukan kepada pegawai sipil dan militer (Zed, dkk., 1997: 39; Rosidi, 1986: 107).

Dalam kunjungannya kedua ini Moh. Hatta melakukan persiapan-persiapan untuk memindahkan pemerintahannya ke Bukittinggi, jika sekiranya terjadi serangan Belanda di Jawa. Moh. Hatta memilih Sumatera sebagai kedudukan pemerintahan darurat, karena Sumatera memberi kemungkinan yang jauh lebih menguntungkan untuk melanjutkan perang gerilya. Bagi Moh. Hatta, Sumatera adalah daerah alternatif dan sekaligus masa depan perjuangan. Diperhitungkan luas daerah dan faktor ekonomi. Sumatera jelas lebih luas dan relatif belum banyak dibuka. Sumatera juga lebih kaya komoditi untuk perdagangan luar negeri. Hubungan dan perdagangan luar negeri lebih mudah dilakukan terutama melalui Singapura (Dubbin, 1992)

Ketika mengunjungi Sibolga, Hatta mendapat

panggilan untuk kembali ke Yogyakarta guna menghadapi perundingan dengan Belanda. Perundingan lanjutan dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Stikker. Seperti terlihat nanti, hasil perundingan tidak membuahkan hasil. Semakin menambah keyakinan Moh. Hatta bahwa Belanda menjadi tidak sabar dan segera memanfaatkan kekuatan militer. Saat Moh. Hatta harus meninggalkan Sumatera, Syafruddin Prawiranegara dan beberapa pejabat masih tetap tinggal di Sumatera. Moh. Hatta selanjutnya mengeluarkan Ketetapan Wakil Presiden No. 84/WKP/Sum/48 tanggal 26 Nopember 1948 yang berisi petunjuk-petunjuk umum bagi Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera (Chaniago, 1989: 75-77). Menurut Syafruddin Prawiranegara pada waktu itu muncul gagasan membagi pemerintahan menjadi tiga untuk meneruskan perjuangan. Presiden Sukarno akan memimpin perjuangan diplomasi internasional dari luar negeri. Wakil Presiden/Perdana Menteri Moh. Hatta akan memimpin perjuangan dari suatu tempat di Sumatera. Beberapa orang menteri dan pimpinan Angkatan Perang akan meneruskan perjuangan di Jawa (Rosidi, 1986: 107).

Moh. Hatta juga melakukan kontak dengan Nehru melalui konsul India agar Presiden dan Sjahrir diterbangkan ke India untuk mengangkat persoalan RI di luar negeri, sekaligus melindungi dari kemungkinan terbunuh jika serangan Belanda benar-benar terjadi (Zed, 1997: 58). Dalam rapat kabinet tanggal 16 Desember 1948 diputuskan, karena Presiden akan pergi ke India dan PM Moh. Hatta mengambil cuti karena sakit, maka pemerintahan akan dijalankan oleh Soekiman, Soesanto Tirtoprodjo, dan Djuanda (Yayasan 19 Desember 1948, 1994: 52; Imran, Djambari, Chaniago, 2003: 54)

Dalam rapat kabinet yang diadakan untuk menghadapi situasi gawat akibat Agresi Militer Belanda II diputuskan bahwa pimpinan pemerintahan tidak akan mengungsi, memberikan mandat kepada menteri kemakmuran yang sedang berada di Sumatera, dan jika usaha Syafruddin Prawiranegara gagal maka perwakilan RI di luar negeri (sedang berada di New Delhi) diperintahkan untuk membentuk pemerintahan di pengasingan (Chaniago, dkk., 1989: 102). Rupanya Sukarno-Hatta percaya akan kekuatan strategi diplomasinya. Peran Hatta dalam pengambilan keputusan sidang kabinet menjadi penting, karena selain sebagai PM juga sebagai Menteri Pertahanan. Hatta yakin akan dukungan internasional terhadap legalitas pemerintahannya. Didasarkan kemenangannya atas kekuatan-kekuatan prokomunis pada Peristiwa Madiun. Keberhasilan itu paling tidak membuka peluang Republik mendapat dukungan dari Barat, terutama Amerika Serikat. Keberhasilan memadamkan gerakan komunis di Madiun, tanpa sedikitpun memperoleh bantuan dari pihak asing, mendongkrak prestise pemerintahan Hatta. Ditambah, prestasi tersendiri karena operasi

pemulihan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini membawa keyakinan pada Hatta bahwa dunia internasional tidak akan membiarkan tindakan semena-mena Belanda. Lebih kongkritnya keputusan membiarkan para pemimpin ditawan didasarkan tiga alasan. Pertama, karena jumlah pasukan pengawal tidak mencukupi. Dibutuhkan dua batalyon penjaga untuk menjaga keamanan Sukarno-Hatta. Ini beban berat bagi tentara dalam sistem perang gerilya. Kedua, Hatta yakin Belanda tidak mampu betul-betul mengalahkan tentara Republik dalam sistem perang gerilya dan 'perang tak berkesudahan akan terus berlangsung' (Agung, 1991: 211).

Khusus alasan kedua tidak bisa dibiarkan, harus ada jalan penyelesaian. Kemungkinan itu ada pada alasan ketiga. Ketiga, peran Komisi Jasa-jasa Baik tidak bisa diabaikan. Penangkapan dirinya dan pemimpin yang lain akan dianggap sebagai korban agresi Belanda. Mengesankan sebagai pemimpin nasional dari suatu negara yang ditangkap pihak agresor di istana. Hal ini lebih terhormat dan lebih mengundang simpati internasional. Pemimpin Republik sengaja membiarkan diri ditangkap dengan harapan opini dunia akan tersinggung. Martabat, wewenang serta jasa-jasa baik PBB tampaknya telah diperlakukan secara tidak pantas oleh Belanda (Ricklefs, 1995: 349-350). Di sini tampak kelihaihan politik Moh. Hatta dalam menangkap perubahan sikap politik Amerika dan mengelolanya dengan baik. Moh. Hatta juga mengandalkan kesanggupan Cochran dan agen CIA Campbell untuk memberikan bantuan terhadap RI pasca keberhasilannya menyelesaikan Peristiwa Madiun (Gouda & Zaalberg, 2008: 362-368).

Sebelum ditawan, Wakil Presiden Moh. Hatta sebagai Menteri Pertahanan mengeluarkan Order Harian kepada semua Angkatan Perang dan semua instansi pemerintah. Isinya, karena tidak dapat melakukan tugas kewajiban maka pemerintahan RI diteruskan di Sumatera dan apapun yang terjadi perjuangan tetap dilanjutkan (Chaniago, dkk., 1989: 100-101; Nasution, 1979: 19; Rose, 1991: 265). Di samping itu, jika dalam hal ini pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya, Syafruddin Prawiranegara diberi kuasa membentuk Pemerintah Republik Darurat di Sumatera. Jika ikhtiar Syafruddin untuk membentuk pemerintahan di Sumatera mengalami kegagalan, kepada Dr. Sudarsono, Palar, Mr. Maramis dikuasakan untuk membentuk *exile-Government* di India. Untuk masalah ini Hatta berharap Dr. Sudarsono, Palar, Mr. Maramis dapat berhubungan dengan Syafruddin di Sumatera. Jika tidak mungkin maka dipersilakan untuk mengambil tindakan seperlunya (Zed, dkk., 1997: 71).

Kedua pernyataan Moh. Hatta disiarkan melalui radio, khusus pemberian mandat dikirimkan melalui telegram. Namun, di kemudian hari Syafruddin mengakui bahwa telegram tidak pernah diterimanya.

" ..... waktu itu saya belum tahu bahwa ada rapat Kabinet terakhir tanggal 19 Desember 1948 sebelum Belanda memasuki kota Yogyakarta, telah memberikan mandat kepada saya untuk membentuk pemerintahan darurat. Itu kami tidak tahu. Entah bagaimana bisa terjadi. Baru kemudian ada yang memberitahu kepada saya. Entah bagaimana saya mendapat berita itu. Tapi jauh sesudah itu baru saya mendengar ada mandat. Jadi saya (adalah) pemerintah yang syah. Pemerintah Darurat didirikan atas kemauan sendiri tetapi juga pemerintah yang syah (karena) mendapat mandat yang syah" (Chaniago, dkk., 1989: 6-7; Rosidi, 1986: 110).

Syafruddin Prawiranegara menyatakan bahwa pembentukan PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) semata-mata karena inisiatif dirinya bersama beberapa tokoh yang lain (Prawiranegara, 1986: 201; Rosidi, 1986: 113-115). Hal ini agak ganjil, karena beberapa hari sebelum agresi militer, Moh. Hatta telah mempersiapkan kemungkinan itu. Hal yang sangat mungkin, Syafruddin hanya merealisasikan gagasan dan persiapan yang telah dilakukan oleh PM. Moh. Hatta. Pernyataan pemerintah tanggal 19 Desember 1948 tentang pembentukan pemerintah darurat hanyalah ketetapan resmi dari suatu persiapan atas kemungkinan krisis pemerintahan yang sudah diprediksi sebelumnya.

Ketika rapat kabinet sedang berlangsung, Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman karena sakit menunggu di luar. Keputusan untuk membiarkan diri ditangkap musuh jelas sangat mengecewakan dirinya. Sebelumnya Presiden Sukarno telah mengatakan akan memimpin sendiri pertempuran, di tengah-tengah tentara dan rakyat (Merdeka, 29 Mei 1948). Sudirman menuntut janji Sukarno tapi tidak diluluskan. Dalam kekecewaan Letnan Jenderal Sudirman menyingkir untuk melakukan perang gerilya. Memulai apa yang oleh Notosusanto (1977: 20) sebagai puncak karirnya, yakni memimpin perang gerilya. Panglima Besar Sudirman, sebelum bergerilya masih sempat mengeluarkan Perintah Kilat No. 1/PB/D/48 yang disiarkan melalui RRI (Radio Republik Indonesia) Yogyakarta. Isinya antara lain mewajibkan semua Angkatan Perang menjalankan "rencana yang telah ditetapkan" untuk menghadapi serangan Belanda (Yayasan 19 Desember 1948, 1994: 47). "Rencana yang telah ditetapkan" adalah apa yang terdapat dalam Instruksi Panglima Besar tanggal 9 Nopember 1948. Dengan Perintah Kilat itu, berarti sejak tanggal 19 Desember 1948 pasukan diperintahkan untuk *wingate* dan membentuk *wehkreise*. Pergelaran perang gerilya secara nyata resmi dimulai.

Pemimpin Republik yang dapat ditawan adalah Sukarno, Hatta, Sjahrir, Assaat, A.G. Pringgodigdo, Agus Salim, Ali Sastroamijoyo, dan Komodor Udara Suriadarma. Sambil menunggu dipindahkan para

pemimpin itu dikenai tahanan rumah. Pada tanggal 22 Desember 1948 para pemimpin diterbangkan menuju tempat penahanan yang tidak diketahui sebelumnya (Adams, 1966: 381). Sebelum dipindahkan ke tempat lain Presiden dan Wakil Presiden terlibat pembicaraan yang alot dengan Komandan Brigade T Belanda. Presiden bersikeras diperlakukan sebagai Kepala Negara dan bukan sebagai tahanan biasa (Toer, 2003: 712). Sukarno, Hatta, Sjahrir, Assaat, A.G.Pringgodigdo, Agus Salim, Ali Sastroamijoyo, dan Komodor Udara Suriadarma diterbangkan Belanda ke Pulau Bangka. Di sana Sukarno, Sjahrir dan Agus Salim dipisahkan dari yang lainnya dan diterbangkan ke Brastagi, kemudian ke Prapat (Kahin, 1952: 338; Giebels, 2001: 472; Sastroamidjojo, 1974: 244-245).

### **KPPD: Pemerintahan Gerilya**

Saat ibukota berhasil diduduki sejumlah menteri sedang berada di luar kota. Para menteri yang selamat sedang berada di Kota Solo untuk mengadakan persiapan-persiapan berkenaan hasil rapat kabinet tanggal 16 Desember 1948. Seperti telah disinggung di muka rapat kabinet membicarakan rencana Presiden Sukarno pergi ke India dan cuti sakit Wakil Presiden. Selama Presiden berkunjung ke luar negeri dan Wakil Presiden cuti karena masalah kesehatan, maka untuk sementara pemerintahan akan dikendalikan oleh Menteri Dalam Negeri (Sukiman), Menteri Kehakiman (Susanto Tirtoprodjo) dan Menteri Perhubungan (Juanda). (Yayasan 19 Desember 1948, 1994: 52).

Kabar bahwa tentara Belanda bergerak ke Solo segera sampai kepada Sukiman Wiryoanjojo (Menteri Dalam Negeri), Susanto Tirtoprodjo (Menteri Kehakiman), Supeno (Menteri Pembangunan dan Pemuda), dan I.J. Kasimo (Menteri Persediaan Makanan Rakyat). Dengan tidak menunggu waktu keempatnya mengundurkan diri ke Karangpandan, Kabupaten Karanganyar (Zed, dkk., 1997: 105). Berhubung kontak dengan Yogyakarta tidak dapat dilakukan maka agar pemerintahan dapat berjalan seperti biasa perlu diadakan pembagian pekerjaan (Yayasan 19 Desember 1948, 1994: 52). Oleh karena itu, bertempat di kantor kawedanan Karangpandan diadakan pertemuan. Selain keempat menteri rapat juga dihadiri pula oleh beberapa tokoh sipil dan militer, seperti R.P Suroso, Kasman Singodimejo, Sumardi, Zainul Arifin, Prawoto Mangkusasmito, Susilowati, Jenderal Mayor Suhardjo Hardjowardoyo, Kolonel Bambang Supeno, Mayor Suprpto, Mayor Maladi, Mayor Rusli, Mayor Muhono, Kapten Mansur, dan Letnan Sugiri (Zed, 1997: 195-196). Rapat menghasilkan keputusan yang dirumuskan dalam bentuk "Pengumuman Pemerintah No. 1" yang baru diumumkan tanggal 21 Desember 1948. Saat itu para menteri belum mengetahui bahwa sejumlah pemimpin di Yogyakarta telah ditawan musuh. Keputusan pembagian pekerjaan yang disepakati

sebagai berikut. (a) Pekerjaan Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Sukiman, sekaligus memimpin kabinet. (b) Pekerjaan Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, dan Kementerian Pekerjaan Umum dilakukan oleh I.J. Kasimo. (c) Pekerjaan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Penerangan dikerjakan oleh Supeno. (d) Pekerjaan Kementerian perburuhan dan sosial, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan oleh Susanto Tirtoprodjo (Yayasan 19 Desember 1948, 1994: 52).

Secara berangsur-angsur Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua PDRI mencoba mengadakan hubungan dengan beberapa pusat gerilya di Jawa. Pada tanggal 29 Januari 1949 Simatupang melaporkan kepada ketua PDRI di Sumatera, bahwa "Commissariaat Pusat Republik untuk Djawa" telah terbentuk pada tanggal 2 Januari 1949. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Commissariaat Pusat Republik untuk Djawa juga telah menyerahkan pimpinan "perjuangan militer" sehari-hari kepada Kolonel Nasution selaku Panglima Jawa (Chaniago, dkk., 1989: 144; Zed, dkk., 1997: 199). Simatupang juga melaporkan telah diadakan rapat antara keempat menteri dengan pimpinan militer. Rapat membicarakan penyempurnaan pemerintahan militer di Jawa, pengajaran, peraturan pengadilan darurat, pajak, dan koordinasi dengan PDRI (Chaniago, dkk., 1989: 139). Setelah mengetahui secara jelas tentang keputusan sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948 perihal pembentukan pemerintah darurat di Sumatera, maka diambil putusan bahwa lima orang menteri (empat orang yang sudah disebut di muka ditambah menteri Agama Kyai Masjkur) memandang diri sebagai bagian yang ada di Jawa dari Pemerintah Pusat RI yang berkedudukan di Sumatera (Chaniago, dkk., 1989: 115).

Ketika situasi telah memungkinkan, Safruddin berhasil menunjuk orang-orang yang mengisi komisariat pemerintahan darurat untuk Jawa. Anggotanya terdiri dari menteri-menteri yang masih aktif, yaitu Susanto Tirtoprodjo, Kasimo, K.H. Majkur, Sukiman, dan Supeno. Komisariat Pemerintah Pusat di Djawa (KPPD) ditetapkan dan diumumkan oleh Menteri Kasimo pada 7 Maret 1949. Selama Sukiman tidak dapat menjalankan tugas, karena ada keperluan lain, maka perannya sementara digantikan oleh R.P. Suroso. Kemudian diketahui Sukiman pulang ke Yogyakarta dan akhirnya tertangkap (Nasution, 1984: 262).

Kolonel Nasution diangkat sebagai penasehat komisariat. KPPD bertanggung jawab kepada PDRI Pusat di Sumatera (Chaniago, dkk., 1989: 143; Warta Indonesia, 4 Januari 1949). Dalam laporan selanjutnya disebutkan pembagian pekerjaan antara anggota KPPD yang mengurus pemerintahan. Sukiman dan Kasimo mengurus wilayah Jawa Tengah. Sementara Susanto Tirtoprodjo, K.H. Masykur, dan Supeno mengurus wilayah Jawa Timur (Chaniago, dkk.,

1989: 142; Djamhari, 1990: 69). KPPD menjalankan pemerintahan umum di Jawa dan Madura. Dengan tugas utama untuk menyusun dan mempergunakan segala tenaga serta sumber-sumber untuk kepentingan perjuangan. Diberitakan KPPD secara gerilya memerintah di daerah-daerah pegunungan dan daerah-daerah yang tidak dikuasai Belanda. Pemerintah gerilya memiliki pemancar radio yang diberi nama "Radio Republik Indonesia Lereng Gunung" (Warta Indonesia, 4 Januari 1949).

Syafruddin Prawiranegara	: Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan
Susanto Tirtoprojo	: Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman, Menteri Pembangunan dan Pemuda
Alexander Andries Maramis	: Menteri Luar Negeri (berkedudukan di New Delhi, India)
Sukiman	: Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan
Lukman Hakim	: Menteri Keuangan
Ignatius J. Kasimo	: Menteri Kemakmuran/Pengadaan Makanan Rakyat
Kyai Haji Masykur	: Menteri Agama
T. Moh. Hassan	: Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
Indrachya	: Menteri Perhubungan
Mananti Sitompul	: Menteri Pekerjaan Umum
Sutan Mohammad Rasjid	: Menteri Perburuhan dan Sosial
Letnan Jenderal Sudirman	: Panglima Besar Angkatan Perang RI
Kolonel Abdul Haris Nasution	: Panglima Tentara & Teritorium Jawa
Kolonel R. Hidayat Martaatmaja	: Panglima Tentara & Teritorium Sumatera
Kolonel Nazir	: Kepala Staf Angkatan Laut
Komodor Udara Hubertus Suyono	: Kepala Staf Angkatan Udara
Komisaris Besar Polisi Umar Said	: Kepala Kepolisian Negara (Chaniago, dkk., 1989: 21).

Setelah berkomunikasi jarak jauh dengan pimpinan Republik di Jawa, maka pada 31 Maret 1949 Syafruddin Prawiranegara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan PDRI sebagai berikut.

### Denyut Kehidupan KPPD di Jawa Timur

Berdasar laporan menteri I.J. Kasimo, anggota Kabinet Darurat yang berada di Jawa tidak berada di satu tempat. Menteri Susanto Tirtoprojo, Menteri Supeno dan anggota BP KNIP Susilowati ada di suatu tempat yang berpindah-pindah di Jawa Timur. Menteri Agama Kyai Masykur di tempat lain. Kemudian baru diketahui Kyai Masykur mencari perlindungan di Pondok Gontor (Tirtoprodjo, 1985: 49; Sudarno, dkk., 1993: 329). Menteri I.J. Kasimo bersama dengan anggota BP KNIP yang lain, Arifin dan Prawoto, berada di Jawa Tengah. Ikut juga bergabung dengan Menteri I.J. Kasimo adalah Jenderal Mayor Suharjo, R.P. Suroso, Moh. Saleh, Dipokusumo, dan Sumali. Sementara itu Sukiman menyusup masuk kota Yogyakarta karena ada hal-hal yang perlu diselesaikan. (Chaniago, dkk., 1989: 116). Pemerintahan sipil ini pada saat tertentu bersatu dengan gerilyawan, karena kondisi memang tidak memungkinkan untuk membuat semacam pusat pemerintahan yang menetap.

Berikut ini paparan perjalanan Menteri Susanto Tirtoprojo dalam mengemban tugas menghidupkan kembali pemerintahan sipil. Hampir seluruh pengalaman perjuangan Menteri Susanto Tirtoprojo selama agresi militer kedua berlangsung di Jawa Timur. Titik berat paparan terutama ketika rombongan menteri bertemu dengan para pejabat pemerintah, sebab hal ini membuktikan bahwa birokrasi sipil sebenarnya masih ada, meskipun barangkali hanya cuma pejabatnya belaka, itu pun tidak lengkap dan berada di tempat persembunyian yang terpisah-pisah. Setiap kali bertemu dengan pejabat Republik, menteri memberikan petunjuk-petunjuk, terutama posisi pejabat sipil dalam Pemerintahan Militer yang sedang berlaku.

Oleh karena dipandang tidak aman lagi Susanto Tirtoprojo, Supeno, dan Susilowati meninggalkan Tawangmangu (Jawa Tengah) menuju ke timur. Setelah jalan tidak lagi dapat dilalui kendaraan, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki mendaki G. Lawu menuju Desa Girilangit (sudah masuk wilayah Jawa Timur). Rombongan menginap di rumah kepala desa. Asisten Wedana Poncol yang membawahi desa itu datang untuk konsultasi. Esok hari perjalanan diteruskan menuju Kecamatan Parang. Di sini bertemu dengan Mayor Pademan, perwira TNI yang meninggalkan posnya di Tawangmangu karena digempur tentara Belanda. Mayor Paderman menjemput Menteri dengan meminjam mobil Bupati Ponorogo, Gandawardaya. Asisten Wedana Sampung, Sumarto, ikut menjemput. Menteri diantar ke tempat persembunyian Bupati Ponorogo di Sampung. Tidak lama di Sampung

karena dipandang tidak aman, perjalanan diteruskan ke Kawedanan Pulung. Di sisi ternyata cukup banyak pengungsi, diantaranya Sekretaris Kabupaten Ponorogo Sarip Hutomo, Ketua Pengadilan Negeri Rochyani dan Jaksa Sunaryo (Tirtoprodo, 1985: 45-49).

Di Desa Serak, lereng G. Wilis, datang utusan dari Menteri Agama Kyai Masykur yang mengungsi di Pondok Gontor. Selain itu datang juga menemui Menteri, Residen Madiun Pamuji (Tirtoprojo, 1985: 49). Setelah yakin Kyai Masykur memang berada di Ponorogo, Menteri menemuinya di Pondok Gontor. Menteri Agama tidak setuju ketika diajak bergabung. Menurut pendapat Kyai Masjukur jika tiga menteri berkumpul lebih berbahaya. Bila ketiganya tertangkap sangat mengurangi kekuatan perjuangan. Di Desa Serak Menteri Supeno merintis usaha di bidang penerangan dalam bentuk penerbitan majalah yang diberi nama "Berita Praja". Dipimpin Andi Ananto dengan dibantu beberapa pemuda (Rahardjo, tt: 228; Sudarno, dkk., 1993: 330). Menteri juga sempat menemui Letnan Jenderal Sudirman di desa Bajulan. Dalam pertemuan Panglima Besar lebih banyak berbicara tentang peristiwa yang terjadi sebelum para pemimpin di Yogya ditawan, termasuk langkah pemerintah untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera (Rahardjo, tt: 225; Sudarno, dkk., 1993: 330).

Setelah menginap beberapa hari di Desa Serak perjalanan diteruskan memasuki wilayah Kabupaten Nganjuk dengan melewati lereng G. Wilis. Di Desa Genjeng, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk rombongan Menteri bersama dengan Gubernur Jawa Timur Dr. Murjani dan Wakil Gubernur Dul Arnowo bertemu dengan Gubernur Militer Jawa Timur/Panglima Divisi I Letnan Kolonel Sungkono. Bupati Nganjuk, Iskandar Gondo Wardoyo, juga ikut pertemuan. Dalam pertemuan dibicarakan mengenai persoalan negara, seperti biaya peperangan (dalam bentuk promes) dan menetapkan hakim serta jaksa darurat (Rahardjo, tt: 222-224; Sudarno, dkk., 1993: 330-331).

Setelah sempat menginap di Desa Sumberwuluh rombongan Menteri pindah ke Desa Dodol, masih di wilayah Kabupaten Nganjuk. Di sini datang berkunjung Sunaryo, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, yang mencari menterinya. Menteri juga bertemu dengan Kasman Singodimejo yang ketika pecah perang sedang berada di Bojonegoro. Terjadi kesepakatan bahwa Kasman Singodimejo akan meneruskan pekerjaan penerangan kepada masyarakat. Di desa sepi ini juga datang berkunjung Bung Tomo. Dirasa kurang aman rombongan Menteri kemudian masuk hutan dan berpindah-pindah, akhirnya menginap di Desa Ganter. Di sini terjadi peristiwa menyedihkan. Ketika mandi pagi di pancuran Menteri Supeno, Samodra (putera Pj. Gubernur Jawa Timur Samadikun) bersama lima pemuda ditangkap dan kemudian ditembak. Saat itu hari Kamis tanggal 24 Februari 1949. Sampai dengan meninggalnya, Menteri Supeno dan enam pemuda

itu tidak menunjukkan tempat persembunyian anggota rombongan yang lain, sehingga Menteri Susanto selamat (Rahardjo, tt: 230; Sudarno, dkk., 1993: 331-333).

Untuk menghindari pembersihan menteri dan pengikut yang masih ada masuk hutan. Lebih dari seminggu Menteri di dalam hutan sambil mencari jalan ke desa yang aman. Akhirnya, sampai Pamongan, desa terakhir sebelum sampai puncak G. Wilis. Di sini bertemu dengan Bung Tomo lagi, Sutomo Jauhar Arifin (Kepala Jawatan Penerangan Propinsi Jawa Timur), dan Sarjan anggota BPKNIP. Di Pamongan datang Residen Kediri Suwondo Ranuwijoyo, Muntoro (Sekretaris Karesidenan), dan Husni (Kepala Bagian Keuangan Karesidenan). Setelah tiga hari di Pamongan rombongan melanjutkan perjalanan ke sebuah persil di Sumberpandan. Di sini Menteri mendapatkan sebuah pemancar radio yang dipertahankan mati-matian oleh orang bernama Kadyarsa. Pada tanggal 9 Maret 1949 pukul 20.00 Menteri Susanto berpidato di radio, isinya menyangkut sikap politik RI dan mengumumkan tentang gugurnya menteri Supeno (Sudarno, dkk., 1993: 334).

Menteri meneruskan perjalanan ke Trenggalek. Dengan ditemani Wedana Trenggalek, Mukadi, Menteri bertemu komandan KDM Trenggalek bernama Tulus. Bupati Ngawi, Mudayat, datang menemui Menteri menyampaikan informasi bahwa Gubernur Jawa Timur Dr. Murjani dan wakilnya Dul Arnowo ditangkap musuh. Kejadiannya tanggal 24 Pebruari 1949 bersamaan dengan gugurnya Menteri Supeno. Oleh karena kedudukan Gubernur demikian penting, Menteri Susanto menunjuk Samadikun menjadi Pj. Gubernur Jawa Timur (Rahardjo, tt: 261; Sudarno, dkk., 1993: 334-335).

Dengan dijemput Wedana Karang, Lantip, Menteri Susanto meninggalkan Trenggalek menuju Karang. Di Karang menginap selama lima hari. Hari keenam dengan diantar Wedana Panggul, Kusno, rombongan Menteri menuju Dongko dan terus menuju Karangtengah. Bupati Pacitan Subekti bersama Wedana Slorok bernama Sosro Hadisewoyo menemui Menteri. Selanjutnya rombongan Menteri memasuki wilayah Kabupaten Pacitan. Di Desa Tanjung Lor Menteri mendapat kunjungan komandan KDM Pacitan, Kapten Harsono. Untuk kedua kalinya Bupati Pacitan mengunjungi Menteri. Selanjutnya rombongan Menteri mengunjungi Letnan Jenderal Sudirman di Sobo. Ini yang kedua kalinya Menteri Susanto bertemu Panglima Besar. Antara kedua petinggi negara ini kemudian bertemu sekali lagi. Dalam pertemuan ketiga Menteri Susanto mendapat informasi bahwa pada bulan Juli 1949 Pemerintah RI akan kembali ke Yogyakarta (Sudarno, dkk., 1993: 339).

Pj. Gubernur Jawa Timur, Samadikun, pada 15 Maret 1949 mendapat perintah Menteri Susanto Tirtoprojo selaku Menteri Dalam Negeri *ad interim*

untuk menemui pamong praja di Jawa Timur. Surat penugasan disampaikan melalui A. Gapar, seorang pegawai Jawatan Penerangan RI Jawa Timur. Tujuan penugasan ini adalah memelihara eksistensi seluruh jenjang pamongpraja disertai perintah, agar di mana ditemukan adanya kekosongan segera diisi dengan mengangkat pejabat penggantinya. Intruksi ini merupakan langkah menangkis ketidakbenaran isu yang dilancarkan pihak Belanda, bahwa militernya telah menghancurkan Republik dengan seluruh perangkatnya, termasuk birokrasi sipilnya (Noer, 1983: 224; Soewito, 1994: 515). Samadikun juga diperintahkan melakukan koordinasi dan kerjasama pemerintahan sipil dengan perwira KMD, KDM dan KODM (Rahardjo, tt: 262; Sudarno, dkk., 1993: 347). Menemui residen dan aparat dibawahnya dalam situasi perang bukanlah sesuatu yang mudah. Di samping lokasi perlindungan pejabat yang pro Republik tidak jelas, jarak yang demikian jauh harus ditempuh dengan jalan kaki, juga yang sangat penting jangan sampai tertangkap musuh. Oleh karena itu, perjalanan harus menghindari jalan-jalan yang kemungkinan dilalui oleh patroli musuh dan juga bergantung pada kesanggupan untuk melakukan penyamaran. Sementara staf gubernur tidak ada seorangpun. Semua pegawai gubernuran bubar menyelamatkan diri ketika Blitar diserbu Belanda. Dalam perjalanan Pj. Gubernur Samadikun mengajak dua orang pelajar anggota IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) bernama Sudarno dan Sumadi (Sudarno, 1993: 348; Soewito, 1994: 515; Rahardjo, tt: 266; Djawatan Penerangan Republik Indonesia Djawa Timur, 1953: 17).

Perjalanan berlangsung 40 hari, dimulai April 1949. Berbekal uang Rp. 5.000 (uang ORI) pemberian Bupati Blitar, Darmadi (ayah Shodancho Supriadi, tokoh PETA yang mengadakan perlawanan terhadap penjajah Jepang di Blitar). Samadikun dan Sudarno berjalan kaki menuju timur, ke arah Malang. Di Desa Sindurejo, Kecamatan Tumpang (Kabupaten Malang bagian timur), bertemu dengan Residen Malang, Abu Bakar, dan Sekretaris Residen, Arwoko. Di sini masih bisa didapat surat kabar berbahasa Belanda "De Vrije Pers" dan "Nieuw Indische Courant". Informasi penting dari kedua surat kabar itu oleh kedua pemuda dibuatkan semacam ikhtisar. Ikhtisar berita ini, setelah dianalisa dan disimpulkan, selanjutnya menjadi bahan pembicaraan dalam pertemuan dengan pejabat-pejabat Republik yang ditemui selama perjalanan (Sudarno, dkk., 1993: 350).

Dari daerah pegunungan sejuk di Malang bagian timur perjalanan dilanjutkan ke daerah Karesidenan Surabaya melalui daerah pegunungan di bagian barat Kabupaten Malang. Di Wonosalam, Kabupaten Jombang, bertemu dengan Inspektur Polisi Sayid Rachmad, Staf Residen Surabaya Samiono dan Tuk Hasan dari Jawatan Penerangan. Dengan dibantu ketiga orang ini, Samadikun berusaha mencari tempat pengungsian Residen Surabaya. Dari Wonosalam perjalanan diteruskan ke Gudo. Di Gudo

bertemu dengan Asisten Wedana Gudo, R. Mustajab Sumowidigdo dan Wedana Ngoro Samiono. Diperoleh kabar bahwa Residen Sudirman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 April 1949 di Desa Jogos (Kediri). Datang kemudian menyusul ke tempat ini Sekretaris Residen Surabaya Sutaji. Sutaji selanjutnya diangkat sebagai Pj. Residen Surabaya. Pembicaraan selanjutnya lebih banyak membahas persoalan bahan makanan dan pembentukan "Pager Desa" (Soewito, 1994: 515; Djawatan Penerangan Republik Indonesia Djawa Timur, 1953: 18; Sudarno, dkk., 1993: 351).

Perjalanan diteruskan menuju Karesidenan Bojonegoro. Setelah berhasil menyeberangi sungai Brantas dengan perahu tambangan, Samadikun telah ditunggu oleh K.H. Wahid Hasyim. Malam harinya rupanya ada utusan yang menghubungi K.H. Wahid Hasyim. Percakapan dilakukan sambil berjalan. K.H. Wahid Hasyim tidak lama menemani, selebihnya perjalanan diteruskan dengan menjelajahi ganasnya alam pegunungan Kendeng. Akhirnya tiba di markas pasukan Willy Sujono. Di sini ditemukan radio sehingga sempat mendengar adanya *Roem-Roijen statement*. Lokasi pengungsian aparat Karesidenan Bojonegoro ternyata tidak mudah ditemukan. Pencarian terus dilakukan dengan mendapat bantuan dari Batalyon Jarot Subiyantoro. Kurir disebar ke berbagai arah. Akhirnya di sebuah gubuk di tengah hutan Samadikun bertemu Bupati Bojonegoro, Surowiyono. Berdasar informasi dari Bupati, Residen Bojonegoro Tandonu Manu, berada di Desa Seling. Samadikun bergerak menuju Seling. Segera setelah bertemu konferensi segera dilakukan. Dihadiri pejabat sipil dan militer, diantaranya Residen dan Bupati Bojonegoro, Letkol Sudirman, Mayor Basuki Rahmat, dan Ryadi sebagai Kepala Polisi Bojonegoro. Letkol Sudirman menyampaikan laporan perkembangan pertahanan dan aksi gerilya di karesidenan Bojonegoro. Samadikun memberi penjelasan tentang *Roem-Roijen Statement*. Diingatkan pula agar jangan terpengaruh pernyataan yang belum tentu hasilnya itu. Untuk itu daya tahan perjuangan perlu diperkokoh (Djawatan Penerangan Republik Indonesia Djawa Timur, 1953: 18-19; Sudarno, dkk., 1993: 354-355; Soewito, 1994: 517; Rahardjo, tt: 279-280).

Dari Desa Seling perjalanan diteruskan melalui G. Pandan menuju lereng G. Wilis. Tujuannya bagian timur dari Karesidenan Madiun. Sejak perjalanan dari Desa Malangbong (Kabupaten Nganjuk) Samadikun hanya ditemani seorang pengiring saja. Salah seorang pengiring, Sumadi, pulang ke Desa Jatikapur, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Setelah berjalan selama dua hari Samadikun dan Sudarno sampai di Desa Serang, lereng G. Wilis masuk wilayah Kabupaten Madiun. Di sini bertemu dengan Moh. Yasin, Komandan Mobrigr Jawa Timur. Dalam lindungan Moh. Yasin, Samadikun menetap cukup lama. Pada dasarnya ini akhir perjalanan setelah menempuh sekitar 350 km dengan berjalan kaki

selama sekitar 40 hari. Di sini Residen Kediri, Suwondo Ranuwijoyo, menyempatkan diri datang untuk konsultasi (Djawatan Penerangan Republik Indonesia Djawa Timur, 1953: 19; Sudarno, dkk., 1993: 356-357; Soewito, 1994: 517; Rahardjo, tt: 279-280). Untuk sementara tempat perlindungan Residen Madiun belum ditemukan, meskipun kedudukan pemerintahan Karesidenan Madiun juga berada di lereng Gunung Wilis, di sekitar Dungus. Baru beberapa saat kemudian Samadikun bertemu Residen Madiun, Pamuji dan wakilnya, Sidarta (Rekaman wawancara: Pudjiharjo, 1997).

Pj. Gubernur tidak melakukan perjalanan ke Besuki, tetapi laporan tertulis dan lisan diperoleh dari seorang utusan. Adanya kurir ini dirasa cukup, hingga Samadikun tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke daerah Besuki. Berdasar laporan, keterangan, dan pengamatan selama perjalanan, selanjutnya Samadikun menyusun laporan lengkap yang disampaikan kepada Menteri Susanto Tirtoprodjo, melalui Residen Madiun, Pamuji. Laporan tertanggal 22 Mei 1949 itu diterima Menteri pada tanggal 27 Mei 1949. Pj. Gubernur Samadikun juga mengirim kawat kepada MBKD dan PDRI yang isinya sebagian besar tentang kesan dan pengalamannya selama melakukan perjalanan gerilya, diantaranya daerah yang diduduki Belanda hanya kota-kota, jalan-jalan besar dan pabrik-pabrik; gerakan gerilya semakin menghebat; Belanda tidak berhasil membentuk pemerintahan sipil di wilayah yang baru diduduki; pemerintahan sipil Belanda di kota-kota besar dan kecil yang sejak lama diduduki tidak berjalan lancar; beberapa daerah yang sebelum Agresi Militer II telah diduduki Belanda sekarang dalam arti politik telah dikuasai Republik. Di akhir laporan laporannya dikemukakan, meskipun Samadikun menyetujui Roem-Roijen, tapi sebenarnya pejabat dan rakyat Jawa Timur sanggup berjuang untuk waktu yang lama (Chaniago, dkk., 1989: 145).

## KESIMPULAN

Berdasar laporan staf Divisi I hingga akhir bulan Maret 1949 sebenarnya KPPD sebagai pemerintahan sipil belum bisa berjalan dengan baik. Aparat sipil cenderung "minder" melihat militer demikian dominan mengatur bidang-bidang yang seharusnya menjadi tanggung jawab sipil. Militer terlalu banyak ikut campur soal-soal pemerintahan sipil, sehingga aparat sipil merasa sering dilangkahi (Soewito, 1994: 511). Hal demikian terjadi karena pihak militer memberlakukan Pemerintahan Militer. Setiap Panglima Militer menjadi Gubernur Militer dengan membentuk staf di wilayah kekuasaannya. Sementara itu, Gubernur sipil akan bertindak sebagai Kepala Staf urusan pemerintahan sipil. Ketentuan mekanisme semacam itu berlaku sampai tingkat kecamatan. Pemerintahan Militer bersifat totaliter, sekaligus mengadakan pemerintahan gerilya yang totaliter pula, sebagai syarat untuk

mengadakan pertahanan dan perlawanan rakyat semesta (Supriyatmono, 1994).

## DAFTAR RUJUKAN

### A. ARSIP & ARSIP YANG DITERBITKAN

Yogya Dokumenten, 1946-1948, ANRI, Jakarta

Chaniago, J.R., dkk., 1989. *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dalam Khasanah Kearsipan*. Jakarta: ANRI

### B. SEJARAH LISAN

Rekaman wawancara: Pudjiharjo. 2000. Surabaya: Badan Arsip Propinsi Jawa Timur,

### C. SURAT KABAR

Merdeka, 1948

Warta Indonesia, 1949

### D. BUKU & JURNAL

Notosusanto, N., 1977. "Soedirman Panglima Yang Menepati Janjinya", *Prisma*, No. 8 Agustus Tahun VI. Jakarta: LP3ES, hlm. 15-23

Adams, C., 1966. *Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung

Agung, I.A.A.G., 1991. *Renville*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Chaniago, J.R., 1990. "Lintasan Sejarah PDRI (1948-1949)", dalam Abdurrachman Surjomihardjo & J.R. Chaniago (Ed.), *Pemerintah Darurat Republik Indonesia Dikaji Ulang*. Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia, hlm. 42-54

Djamhari, S.A., 1990. "Pemerintah Darurat RI di Jawa", dalam Abdurrachman Surjomihardjo & J.R. Chaniago (Ed.), *Pemerintah Darurat Republik Indonesia Dikaji Ulang*. Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia, hlm. 67-74

Dubbin, C., 1992. *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah, 1784-1847*. Jakarta: INIS

Giebels, L., 2001. *Soekarno, Biografi 1901-1950*. Jakarta: Grasindo

Gouda, F. & Thijs Brocades Zaalberg, 2008. *Indonesia Merdeka Karena Amerika? Politik Luar Negeri AS dan Nasionalisme Indonesia, 1920-1949*. Jakarta: Serambi

Groen, P.M.H., 1991. *Marsroutes en Dwaalsporen, Het Nederlands Militair-Strategisch Beleid in Indosnesie 1945-1950*. The Hague: Historical Section of the Royal Netherlands Army

Imran, A., Saleh A. Djambari, J.R. Chaniago, 2003. *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) Dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Citra Pendidikan & Perhimpunan Keekerabatan Nusantara

Jawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur, 1953. *Propinsi Jawa Timur*.



- Surabaya: Jawatan Penerangan Republik Indonesia Jawa Timur
- Kahin, G.Mc.T., 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press
- Nasution, A.H., 1979. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 10*. Bandung: Disjarah-AD & Angkasa
- \_\_\_\_\_. 1984. *Pokok-pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa Lalu dan Yang Akan Datang*. Bandung: Angkasa
- Noer, M., 1983. "Kisah Suatu Perjuangan (Kenang-kenangan Tentang Liku-likunya Perjuangan)", dalam Markas Besar Legiun Veteran RI, *Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan*. Jakarta: Markas Besar Legiun Veteran RI, hlm. 218-225
- Prawiranegara, S., 1986. "Pemerintah Darurat", dalam Colin Wild & Peter Carey (Peny.), *Gelora Api Revolusi, Sebuah Antologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, hlm. 198-205
- Rahardjo, R. (Ed), tt. *Kirab Pemerintah Darurat RI di Jawa Timur*. Surabaya: Himpunan Penulis dan Sastrawan MKGR Jawa Timur
- Ricklefs, M.C., 1995. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rose, M., 1991. *Indonesia Merdeka. Biografi Politik Mohammad Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rosyidi, A., *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT, Sebuah Biografi*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986
- Sastroamidjojo, A., 1974. *Tonggak-tonggak di Perjalananku*. Jakarta: PT. Kinta
- Soewito, I.H.N.H., 1994. *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan, Jilid 3*. Jakarta: Grasindo
- Sudarno, dkk., 1993. *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur Selama Perjuangan Fisik 1945-1950*. Jakarta: Balai Pustaka
- Surjomihardjo, A. & J.R. Chaniago (Ed.), 1990. *Pemerintah Darurat Republik Indonesia Dikaji Ulang*. Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia
- Tirtoprodjo, S. 1985. "Nayaka Lelana", dalam J.J. Ras, *Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir*. Jakarta: Grafitipers, hlm. 44-49
- Toer, P.A., Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil, 2003. *Kronik Revolusi Indonesia, Jilid IV (1948)*. Jakarta: KPG
- Zed, M., 1997. *Somewhere in the Jungle. Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti